



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Rasakunda, Kelurahan Batu Intan Pangkalpinang 33143

Telp. (0717) 421466, 422535, Fax. (0717) 422375

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 050/ /SK/Bag.Adpem/SETDA/IX/2021

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

TAHUN 2018-2023

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang telah disusun dalam Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah kota dan satuan kerja pemerintah daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program pada Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2109 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akunfabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3);

17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 3);

18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 29)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : .

KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum lampiran lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Program pada Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum lampiran lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,



RADMIDA DAWAM, S.H., MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640127 199303 2 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

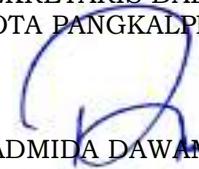
Nomor : 050/ /SK/Bag. Adpem/SETDA/IX/2021

Tanggal : September 2021

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUSAN/FORMULA	SATUAN	TARGET				
						2019	2020	2021	2022	2023
1		Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian dalam urusan kebijakan, dan penyelenggaraan administrasi hukum, pemerintahan, dan organisasi	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SETDA	Penilaian Tingkat Maturitas (Maturity Level) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,50	3,60			
2		Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kota Pangkalpinang	Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM)	Nilai	Sangat tinggi	Sangat tinggi			
3		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	Nilai	85,00	86,00			
4	Meningkatkan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Nilai LPPD	Capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja	Nilai			3,2721	3,2722	3,2723
			Nilai AKIP		Nilai			63,30	65,50	67,70
5		Meningkatkan Laporan kinerja PD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Persentase PD yang menyelesaikan laporan kinerja akuntabel dan tepat waktu	Jumlah PD yang menyelesaikan laporan kinerja akuntabel dan tepat waktu dibagi jumlah seluruh perangkat daerah yang menyampaikan laporan kinerja x 100 %	%			85%	90%	95%

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,


RADMIDA DAWAM, S.H., MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640127 199303 2 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

Nomor : 050/ /SK/Bag.Adpem/SETDA/IX/2021

Tanggal : September 2021

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023

NO.	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	DIKATOR KINERJA PROGR	RUMUSAN/FORMULA	SATUAN	TARGET				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang dianggarkan dikali 100 %	%	100%	100%			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan sarana dan prasarana yang dianggarkan dikali 100 %	%	100%	100%			
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			-	%	100%	100%			
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya	Persentase aparatur yang meningkatkan kapasitas dan kemampuannya	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek /diklat/workshop pada tahun berkenaan dibagi jumlah total ASN pada tahun berkenaan dikali 100 %	%	100%	100%			
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase terpenuhinya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan yang terpenuhi dibagi jumlah target laporan dikali 100 %	%	100%	100%			

6	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Terlaksananya kelancaran pelayanan kedinasan KDH/WKDH	Persentase tersedianya pelayanan kedinasan KDH/WKDH	Jumlah/jenis pelayanan kedinasan KDH/WKDH yang tersedia dan dilaksanakan dibagi total jumlah/jenis pelayanan kedinasan KDH/WKDH yang tersedia dalam tahun berkenaan dikali 100 %	%	100%	100%			
7	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kelembagaan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pemerintahan yang telah dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah total penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pemerintahan yang direncanakan tahun berkenaan dikali 100 %	%	100%	100%			
8	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan pada tahun berkenaan	kegiatan	1	1			
9	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan jumlah kader pemberdayaan masyarakat	Peningkatan jumlah kelompok kader pemberdayaan masyarakat	Kelompok kader pemberdayaan masyarakat yang dibina	kelompok	6				
10	Program Peningkatan Kerjasama Daerah	Jumlah kerjasama daerah yang dapat difasilitasi	Jumlah kerjasama daerah yang dilaksanakan	Jumlah kerjasama daerah yang difasilitasi dan dilaksanakan	kerjasama	10	10			
11	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan Penataan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah total kegiatan Penataan Peraturan Perundang-undangan yang direncanakan dikali 100 %	%	100%	100%			

12	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman, Pengamalan dan Pembinaan Kerukunan Agama	Meningkatkan Kualitas Pemahaman, Pengembangan Agama dan Kerukunan Beragama	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pemahaman, Pengembangan Agama dan Kerukunan Beragama	Jumlah/jenis kegiatan peningkatan kualitas Pemahaman, Pengembangan Agama dan Kerukunan Beragama dibagi total jumlah/ jenis kegiatan peningkatan Kualitas Pemahaman, Pengembangan Agama dan Kerukunan Beragama yang direncanakan dikali 100 %	%	100%	100%			
13	Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Media Massa dan protokol	Meningkatnya pelayanan komunikasi Informasi, dan Protokol	Presentase pelayanan komunikasi Informasi, dan Protokol	Jumlah pelayanan komunikasi Informasi, dan Protokol yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh pelayanan komunikasi Informasi, dan Protokol yang direncanakan dikali 100 %	%	100%	100%			
14	Program Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Presentase Peningkatan Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Peningkatan Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh Peningkatan Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang direncanakan dikali 100 %	%	100%	100%			
15	Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Presentase Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh penyelenggaraan kesejahteraan rakyat direncanakan dikali 100 %	%	100%	100%			
16	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatkan Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa	Presentase Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa	Jumlah kegiatan Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa direncanakan dikali 100 %	%	100%	100%			
17	Program Pengembangan dan Pembinaan Lembaga Ekonomi dan Keuangan	Meningkatkan pengembangan dan pembinaan lembaga ekonomi dan keuangan	Terlaksananya pengembangan dan pembinaan lembaga ekonomi dan keuangan	Jumlah kegiatan pengembangan dan pembinaan lembaga ekonomi dan keuangan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan pengembangan dan pembinaan lembaga ekonomi dan keuangan direncanakan dikali 100 %	%	100%	100%			

18	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Meningkatkan integrasi kebijakan sistem dan prosedur pengawasan penanganan permasalahan perekonomian di Kota Pangkalpinang	Terintegrasinya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan penanganan permasalahan perekonomian di Kota Pangkalpinang	Jumlah kegiatan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan penanganan permasalahan perekonomian yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan penanganan permasalahan perekonomian direncanakan dikali 100 %	%	100%	100%			
19	Program Peningkatan Pengembangan BUMD, Perencanaan, Pengkajian, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi	Meningkatnya Pengembangan BUMD, Perencanaan, Pengkajian, Pembinaan, Monitoring	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan BUMD, Perencanaan, Pengkajian, Pembinaan, Monitoring	Jumlah kegiatan Pengembangan BUMD, Perencanaan, Pengkajian, Pembinaan, Monitoring yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan Pengembangan BUMD, Perencanaan, Pengkajian, Pembinaan, Monitoring direncanakan dikali 100 %	%	100%	100%			
20	Program Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan	Terlaksananya Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan	Jumlah kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan direncanakan dikali 100 %	%	100%	100%			
21	Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah direncanakan dikali 100 %	%	100%	100%			
1	Program Administrasi Umum Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan kinerja dan keuangan tahun berkenaan yang disampaikan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun pada tahun berkenaan dikali 100 %	%			100%	100%	100%
		Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran perangkat daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah total sub kegiatan administrasi perkantoran yang direncanakan dibagi jumlah total sub kegiatan administrasi perkantoran yang terealisasi pada tahun berkenaan dikali 100 %	%			100%	100%	100%

Terwujudnya ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek /diklat/workshop pada tahun berkenaan dibagi jumlah total ASN pada tahun berkenaan dikali 100 %	%			100%	100%	100%
Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana pada tahun berkenaan dalam kondisi baik dibagi jumlah total sarana dan prasarana pada tahun berkenaan dikali 100 %	%			100%	100%	100%
Terlaksananya Operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	Persentase Operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	Jumlah operasional pimpinan daerah yang dilaksanakan dibagi jumlah total operasional pimpinan daerah pada tahun berkenaan dikali 100 %	%			100%	100%	100%
Meningkatnya kinerja organisasi	Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan	Jumlah operasional pimpinan daerah yang dilaksanakan dibagi jumlah total operasional pimpinan daerah pada tahun berkenaan dikali 100 %	%			100%	100%	100%
Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)					65,86 (B)	68,43 (B)	71 (BB)
Terpenuhinya kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi	Persentase pelayanan BLUD yang ditingkatkan	Jumlah kegiatan pelayanan BLUD yang dilaksanakan dibagi jumlah total kegiatan pelayanan BLUD pada tahun berkenaan dikali 100 %	%			100%	100%	100%

3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Terpenuhinya kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	Persentase terpenuhinya pelaksanaan kebijakan perekonomian	Jumlah dokumen kebijakan perekonomian yang dilaksanakan dibagi jumlah total dokumen kebijakan perekonomian pada tahun berkenaan dikali 100 %	%			100%	100%	100%
		Terlaksananya kegiatan pembangunan	Persentase kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	Jumlah dokumen kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah total dokumen kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dikali 100 %	%			100%	100%	100%
		Meningkatnya pengadaan barang yang dilaksanakan	Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan	Jumlah dokumen kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dibagi jumlah total dokumen kegiatan pengadaan barang yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dikali 100 %	%			75%	80%	85%
		Terlaksananya kebijakan terkait sumber daya alam	Persentase kebijakan terkait sumber daya alam yang dilaksanakan	Jumlah dokumen kebijakan terkait sumber daya alam yang dilaksanakan dibagi jumlah total dokumen kebijakan terkait sumber daya alam yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dikali 100 %	%			100%	100%	100%

